



RESEARCH ARTICLE

UPAYA SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

Ulfa Rusiana¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ ulfarusiana@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini diangkat dari situasi dan kondisi wilayah Surakarta yang rawan akan aksi premanisme yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam mencegah dari aksi premanisme di Surakarta, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan aksi premanisme yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Polresta Surakarta, teori yang digunakan adalah teori manajemen, konsep terdiri dari upaya, remanisme dan sabhara, untuk jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan mereduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta adalah dengan penjagaan dan patroli. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta adalah faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Sabhara Polresta Surakarta serta keterlibatan masyarakat sendiri yang mau melaporkan apabila melihat terjadinya aksi premanisme. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah aksi premanisme yang dilakukan oleh Satuan Sabhara yaitu dengan melaksanakan patroli rutin, meningkatkan operasi pekat, menggalang tokoh masyarakat dan pemuda, patroli dialogis terhadap pimpinan kelompok preman.

Kata kunci: *Premanisme, Sabhara, Pencegahan Kejahatan, Polresta Surakarta*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, baik berkembang dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Karena perkembangan suatu negara adalah proses untuk menjadi suatu negara yang lebih baik sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa cita-cita Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka perlu dilakukannya sebuah perkembangan positif untuk Bangsa Indonesia.

Perkembangan tersebut membuat kondisi sosial budaya dan ekonomi di Indonesia menjadi dinamis dan banyak menimbulkan perubahan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat yang terus berubah. Dampak dari perubahan tersebut adalah pengangguran meningkat dan membuat tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Terjadinya kepadatan penduduk dan jumlah pengangguran yang tinggi didukung oleh kemiskinan yang merajalela membuat seseorang banyak melakukan kejahatan untuk dapat bertahan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Salah satu fenomena yang berkembang dengan pesat di masyarakat Indonesia adalah aksi premanisme.

Premanisme merupakan salah satu penyakit di masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit, karena premanisme adalah salah satu kejahatan yang tumbuh dan terus berkembang di masyarakat. Aksi ini tumbuh di berbagai lini kehidupan masyarakat. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut membantu perkembangan aksi premanisme. Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas dan merdeka. Sedangkan isme adalah aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Premanisme erat kaitannya dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain aksi premanisme ini juga membuat resah masyarakat. Apabila keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat telah terganggu, maka Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk dapat menjamin bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri:

- a. Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri.
- b. Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain).

Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan pasal tersebut merupakan

landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law).

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan bahwa Polri memiliki tugas antara lain adalah :

- a. Memelihara kamtibmas
- b. Penegakan hukum yang berlaku
- c. Memberikan pengayoman, perlindungan, serta pelayanan bagi masyarakat

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 14 telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menjaga keamanan dalam negeri, Polri bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terkait kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas telah dijelaskan tugas Polri sebagai alat negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal premanisme Polri lah yang berperan untuk memberikan pembinaan kepada para preman tersebut.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarah dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi,

maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman.

Gambaran maraknya aksi premanisme di Surakarta dikuatkan dengan data yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 28 Januari 2015 hingga 27 Februari 2017 sebanyak 953 orang diduga preman terjaring dalam operasi cipta kondisi yang rutin dilakukan kepolisian. Dari hasil operasi tersebut sebanyak 281 preman disidang dan sisanya 672 menjalani pembinaan. Dilihat dari data diatas menunjukkan ada fakta terjadinya aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Polresta Surakarta. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : “UPAYA SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”.

1.1 Perumusan Masalah

Uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta?

1.2 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi preanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang upaya Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta yaitu dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu sebagai temuan-temuan baru yang hendaknya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan kepolisian kedepannya.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ataupun informasi bagi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan mencegah aksi premanisme.

1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pimpinan mengenai pencegahan aksi premanisme sehingga aksi premanisme dapat tercegah dan terciptanya kamtibmas.
- b. Bagi Polresta Surakarta yaitu diharapkan dapat menjadi masukan atau saran dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- c. Bagi masyarakat yaitu sebagai informasi atau sekedar pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana upaya-upaya Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, kepustakaan tidak dapat dipisahkan karena ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Menurut M.Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988:111). Selanjutnya menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kepustakaan penelitian merupakan hasil penulisan yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan kesamaan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis sekarang. Melalui kepustakaan penulisan dapat diperoleh berbagai perbandingan yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan. Kepustakaan yang menjadi acuan dalam penulisan ini, yaitu penulisan :

- a. Made Wira Suhendra. Mahasiswa STIK-PTIK tahun 2013, dengan judul skripsi "Optimalisasi Penanganan Aksi Premanisme Oleh Satuan Sabhara Polresta Bekasi Kota". Penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif yang berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan-kenyataan tentang objek dan masalah-masalah didukung oleh data-data yang diperoleh, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum tentang keadaan objek. Fokus penelitian atas penanganan kejahatan premanisme oleh Satuan Sabhara Polresta Bekasi Kota. Dalam penulisan ini penulis juga melihat kinerja yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Bekasi kota atas program-program yang telah dicanangkan guna memberantas kejahatan premanisme di wilayah itu. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan objek yang diteliti adalah Satuan Sabhara Polresta Bekasi kota. Persamaannya dengan penulisan

penulis saat sekarang yaitu metode yang digunakan juga analisis deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, obyek yang diteliti adalah Satuan Sabhara Polresta Surakarta, penulis juga meneliti tentang premanisme. Perbedaannya fokus penelitian yaitu upaya-upaya yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme, waktu penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian.

- b. Anhar Arlia Rangkuti. Mahasiswa STIK-PTIK tahun 2010, dengan judul skripsi “Peranan Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Mendukung Program Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan”. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Sumatera Utara tepatnya di Medan. Hasil penelitian ini, pertama menggambarkan bahwa premanisme yang ada di kota Medan sudah merupakan bagian kejahatan yang terorganisir dengan berkedok kepada organisasi kepemudaan. Sedangkan yang kedua dapat mengetahui program yang dilakukan dari pihak kepolisian ataupun instansi pemerintah dalam penanggulangan premanisme di kota Medan dan yang ketiga adalah menggambarkan faktor internal yang mempengaruhi, yaitu tentang kecepatan dan kedisiplinan dari pada anggota Brimob dan faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaporkan apabila melihat kegiatan-kegiatan daripada premanisme. Anggota sat Brimobda Sumut dikenal dengan sebutan Tim Pemburu Preman, dalam pelaksanaannya program penanggulangan premanisme yang dilaksanakan di kota Medan telah berhasil menjaring ribuan preman baik dari preman kelas bawah dan preman kelas atas dan tetap dilaksanakan secara kontinyu bersikembungan. Persamaan hasil penulisan skripsi ini dengan penulisan sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, meneliti tentang premanisme. Perbedaan pada penulisan ini lokasi penelitian, waktu penelitian, dan fokus penelitian.

2.2 **Kepustakaan Konseptual**

Agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan arah dan batas yang ditentukan, maka kepustakaan konseptual merupakan dasar pedoman dalam suatu penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2.2.1 **Konsep Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari upaya ialah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya menegakkan keamanan patut dibanggakan.

Berdasarkan Bahasa makna dalam kamus Besar Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha. Dengan demikian kata ikhtiar dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar, yang dimaksud upaya dalam penulisan ini adalah upaya penulis untuk mencari cara terbaik dan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan aksi premanisme oleh Satuan Sabhara di wilayah Hukum Polresta Surakarta.

2.2.2 **Premanisme**

Premanisme berasal dari kata *vrijman* berarti orang bebas, merdeka dan *isme* berarti aliran adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan

dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. (istilah premanisme dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>).

2.2.3 Fungsi teknis sabhara

Fungsi sabhara merupakan sebagian fungsi kepolisian yang diberi tugas dan wewenang bersifat preventif yang memerlukan keterampilan kemampuan khusus yang telah dikembangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Adapun perumusan dan perkembangan kegiatan fungsi sabhara saat ini meliputi pelaksanaan polisi tugas umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan, SAR terbatas, negosiasi, yan dalmas, tipiring, TPTKP, pemberian bantuan/dukungan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penertiban masyarakat/penegakan hukum secara terbatas.

a. Peranan fungsi sabhara tingkat Mabes Polri :

1. Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi sabhara di satuan kewilayahan
2. Melaksanakan pengendalian dan supervisi
3. Merumuskan juklak/juknis fungsi teknis sabhara
4. Memberikan back-up operasional kewilayahan bila diperlukan
5. Turut serta dalam kegiatan pengamanan pada event nasional dan Internasional
6. Melaksanakan tugas operasional antar Polda

b. Tingkat Polda

1. Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi sabhara satuan kewilayahan/Polres
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi sabhara tingkat Polres
3. Memberikan back-up operasional kewilayahan / Polres
4. Melaksanakan pengendalian dan supervisi

c. Tingkat Polres

1. Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi sabhara satuan kewilayahan/Polsek
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi sabhara tingkat Polres dan Polsek
3. Memberikan back-up operasional kewilayahan Polsek

d. Tingkat Polsek

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi sabhara ditingkat Polsek sampai Pos pol dengan melaksanakan Patroli yang menegemban multi fungsi.

2.2.3 Teori Manajemen

Dalam mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari peran seorang manajer atau pimpinan dalam menerapkan manajemennya. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Sedangkan manajemen menurut George R.Terry dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen (2009) yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC (*planning, organizing, actuating and controlling*).

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan Fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Setelah rencana disusun dan diatur serta ditentukan tentang tupoksi masing-masing maka rencana yang sudah disusun tersebut dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada.

d. *Controlling* (pengendalian)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

Dalam teori ini juga menurut George R. Terry dalam buku “ fungsi-fungsi Manajemen ” (2006:67) mengemukakan 4 (empat) unsur manajemen, yaitu:

a. Manusia (*Man*)

Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia maka tidak ada proses kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan

b. Sarana dan prasarana (*Material*)

Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, dan tanpa adanya materi maka suatu kegiatan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

c. Metode (*Method*)

Metode merupakan penetapan cara pelaksanaan sesuatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

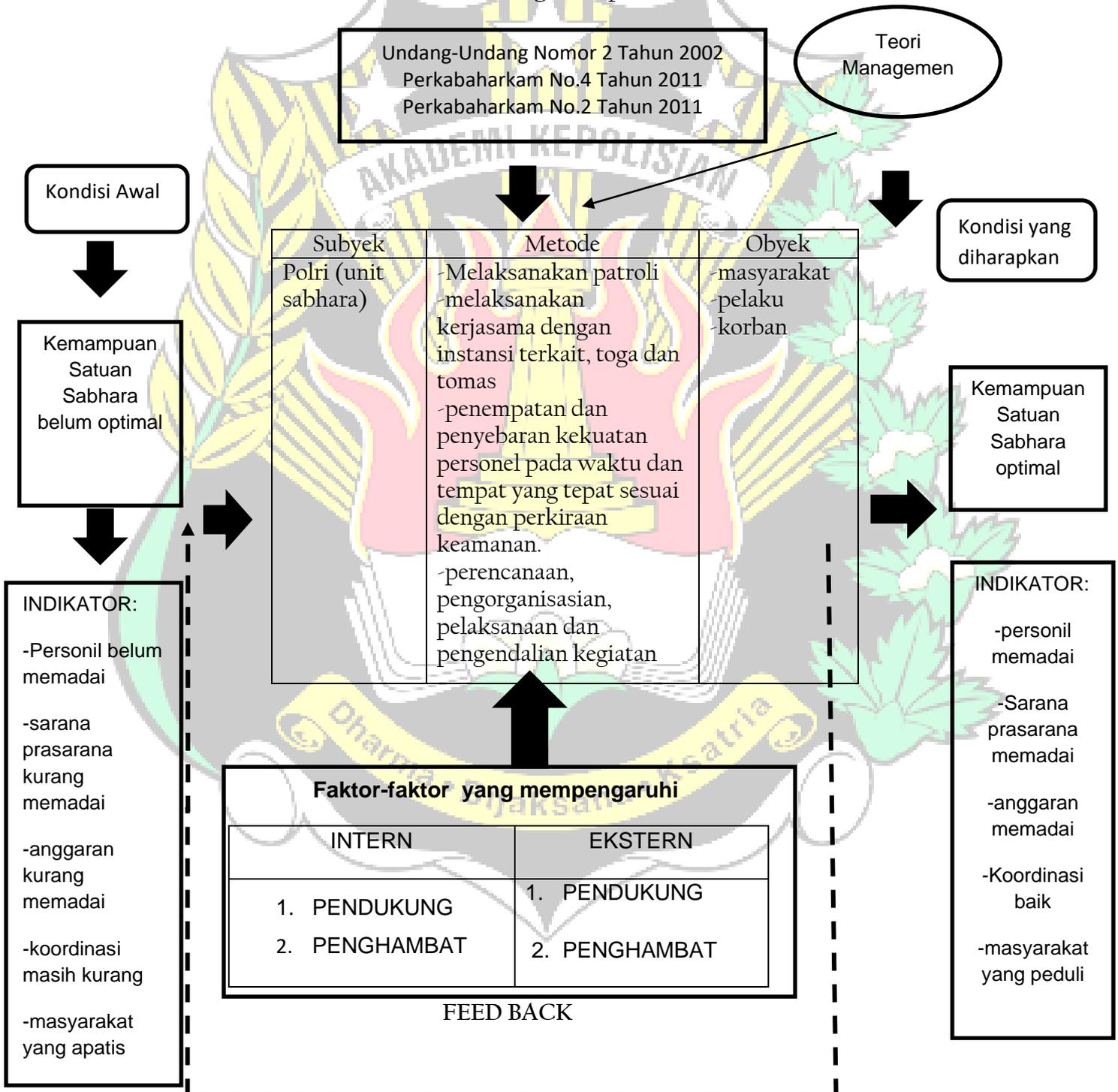
d. Uang (*Money*)

Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan karena merupakan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan serangkain konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh penulis berdasar tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Untuk permasalahan aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta maka penulis memberikan gambaran dengan kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka berpikir



METODE

3.1 Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini berupaya memahami fenomena sosial dengan memperbanyak pemahaman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kemampuan Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam upaya pencegahan aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta. Berdasarkan pengertian diatas ada lima ciri penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1992), yaitu :

Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber data langsung, dan peneliti sebagai instrumen kunci.

- a. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar daripada angka
- b. Penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk. Hal ini disebabkan oleh cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data, setting atau hubungan antar bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
- c. Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif: Peneliti tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang mereka susun sebelum mulai penelitian, namun untuk menyusun abstraksi.
- d. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna bukan sekadar perilaku yang tampak. (<http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>)

Penelitian kualitatif memberikan titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. Dalam hal penggunaan metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) yang karakternya dapat menyelam langsung ke pusat komunitas sasaran menawarkan solusi yang menarik untuk mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan penelitian yang ditimbulkan penggunaan metode lain. Di lain pihak pula, beberapa kendala yang dihadapi tidak dapat dipandang remeh. Peneliti field research dikatakan oleh Neuman haruslah mampu “berpikir sembari berdiri”. Maksudnya, peneliti sebagai instrumen penelitian dalam menghadapi kejadian yang serba tidak pasti di lapangan, perlu bereaksi dengan pemikiran yang cepat. Keadaan ketidakpastian dibarengi dengan informasi yang sangat besar jumlahnya juga membuat field research secara psikologis maupun fisik relatif lebih berat. (<http://makalahlaporanterbaru.blogspot.co.id/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>)

3.2 Fokus penelitian

Penelitian ini mengambil fokus penelitian atas upaya mencegah aksi premanisme oleh Satuan Sabhara di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penulis ingin mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta atas program-program yang telah direncanakan guna memnberantas aksi premanisme di wilayahnya. Hal ini menjadi menarik bagi penulis karena kejahatan premanisme merupakan salah satu kejahatan yang hampir ada disetiap wilayah Indonesia.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Surakarta. Polresta Surakarta dipilih oleh penulis dikarenakan lokasi ini memiliki keanekaragaman suku dan ras masyarakatnya, lokasi ini juga sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Tengah,

dikarenakan lokasi ini memiliki potensi ekonomi yang baik, maka pertumbuhan kejahatan premanisme di wilayah ini berkembang cukup pesat.

3.4 Sumber Data

Subyek hukum yang dijadikan sumber informasi dalam penulisan ini adalah:

- a. Kasat Sabhara Polresta Surakarta
- b. Kanit Turjawali Polresta Surakarta
- c. Anggota Satuan Sabhara Polresta Surakarta
- d. Masyarakat

Sumber diatas didapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari penulis secara langsung dalam penelitian mengenai pencegahan aksi premanisme di polresta Surakarta oleh satuan sabhara. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau disebut dengan informan yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan penulis.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada atau dapat diperoleh dari bacaan pustaka yang bisa mendukung data primer terkait aksi premanisme yaitu berupa hasil penulisan sebelumnya, buku bacaan, dokumentasi tertulis, majalah, monografi, laporan-laporan serta bahan tertulis sejenis lainnya yang berkaitan dengan pencegahan aksi premanisme di polresta Surakarta.

3.5 Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Dalam Sugiyono (2007:83), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Denzin (Moleong, 2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan tugas Sat Sabhara, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel Sat Sabhara. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, dengan menggunakan Perkabaharkam No.2 Tahun 2011, Perkabaharkam No.4 Tahun 2011, teori manajemen. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, observasi, studi dokumen, angket,

dokumentasi dan sebagainya. (<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>). Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti mewawancarai Kasat Sabhara, Kanit Turjawali, anggota Satuan Sabhara dan masyarakat di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Wawancara terbagi atas dua, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Dapat menggunakan : tape recorder, kamera photo, dan lain-lain.
- b. Wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden

3.6.2 Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu tehnik yang cukup ampuh dalam penulisan kualitatif. Observasi (pengamatan) adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan panca indera utama. Pengamatan diawali dengan memandangi, melihat, mengamati subyek/obyek penulisan sehingga diperoleh informasi, tingkah laku, gejala, kasus, dan lain-lain

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta, baik di terminal, pasar tempat-tempat yang rawan atas kejahatan premanisme. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan sistem terbuka, yaitu identitas pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada para pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.

3.6.3 Studi Dokumen

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penulisan penulis mengambil dokumen yang diperlukan dari instansi yang terkait dengan gambaran secara umum dari aksi premanisme di wilayah hukum Polrestata Surakarta.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, (1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. (<https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/>) Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

- a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini penulis melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (data display). Penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan atas statemen (statement) atau pernyataan yang dikemukakan oleh informan yang didapat oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (meaning themes) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan selama proses wawancara berlangsung (general description of the experience).

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*crebility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004). Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada (Moleong, 2004). Trigulasi yang digunakan adalah trigulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara terhadap subjek yang ditekankan pada penerapan metode bantuan alat pada efektif membaca. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang diteliti, rinci dan terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. (<https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/>)

Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan prosedur field note atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan (Kirk dan Miller, 1986: 41-42).

Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Tesch (Creswell, 2002: 144-145), dapat ditempuh tahap-tahap sebagai berikut jika peneliti telah menyiapkan teks atau transkrip wawancara secara lengkap.

- a. Pahami catatan secara keseluruhan. Peneliti akan membaca semua catatan dengan seksama dan mungkin juga menuliskan sejumlah ide yang muncul.
- b. Selanjutnya, peneliti akan memilih satu dokumen wawancara yang paling menarik, yang singkat yang ada pada tumpukan paling atas.

- c. Menyusun daftar seluruh topik untuk beberapa informan.
- d. Tahap berikutnya, peneliti akan menyingkat topik-topik tersebut ke dalam kode-kode dan menuliskan kode-kode tersebut pada bagian naskah yang sesuai.
- e. Selanjutnya peneliti akan mencari kata yang paling deskriptif untuk topik dan mengubah topik-topik tersebut ke dalam kategori-kategori.
- f. Membuat keputusan akhir tentang singkatan setiap kategori dan mengurutkan kategori-kategori tersebut menurut abjad.
- g. Mengumpulkan setiap materi yang ada dalam satu tempat dan memulai melakukan analisis awal.

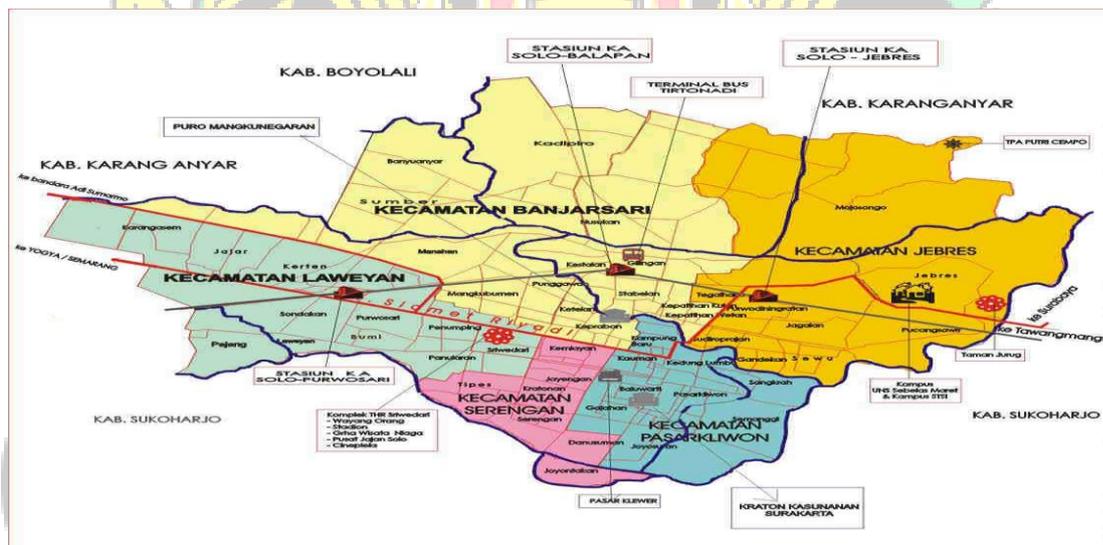
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polresta Surakarta

4.1.1 Geografi

a. Peta Kota Surakarta

Gambar 2



b. Letak Daerah

Daerah Hukum Polresta Surakarta berada pada dataran rendah dengan ketinggian 92 meter di atas permukaan air laut terletak antara 110 45,15 dan 110 45 35 bujur timur dan antara 7,36 dan 7,56 Lintang Selatan, suhu udara Lk. Antara 25,8 c-28,3 Celcius kelembaban udara berkisar 66-88 %. Kota Surakarta berada pada jalur lintas antara Kota Jogjakarta dan Semarang yang juga menjadi jalur penghubung Jakarta-Surabaya.

c. Luas daerah :

Daerah Hukum Polresta Surakarta mempunyai luas daerah 4.404.059 Ha, dimana 60 % merupakan lahan pemukiman.

d. Wilayah Adminitrasi :

1. Kecamatan : 5 Kecamatan terdiri atas:
 - a) Kec.Laweyan terdiri dari 11 Kelurahan
 - b) Kec. Serengan terdiri dari 7 Kelurahan
 - c) Kec.Pasar Kliwon terdiri dari 9 Klurahan
 - d) Kec.Jebres terdiri dari 11 kelurahan
 - e) Kec. Banjarsari terdiri dari 13 Kelurahan.
2. Jumlah kelurahan : 51
3. Kantor kelurahan : 49 Kantor
4. Balai kelurahan : 49 Balai
5. Jumlah kampung : 186
6. Jumlah RW : 595 RW
7. Jumlah RT : 2669 RT

e. Batas Daerah :

Daerah hukum Polresta Surakarta terletak diantara atau berbatasan dengan daerah lain, terdiri dari :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

f. Keadaan Wilayah :

1. Bentuk Permukaan / Kawasan :
 - a) Dibagian Utara (Timur Laut) meliputi daerah Perumnas Mojosongo Kecamatan Jebres Surakarta keadaan Permukaan berbukit.
 - b) Dibagian Timur keadaan permukaan berdataran rendah serta dibatasi dengan Sungai Bengawan Solo.
 - c) Dibagian Barat keadaan daerah berdataran rendah dan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
 - d) Dibagian Selatan keadaan permukaan berdataran rendah dan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
 - e) Dibagian Tengah keadaan permukaan berdataran rendah dan merupakan daerah perkotaan serta merupakan sentral arus lalu Lintas dari luar Kota.

g. Luas Lahan Tanam :

1. Luas Tanam : 443 Ha
2. Luas Panen : 184 Ha
3. Rata Produksi : 44,67 Kw/Ha

4. Jumlah Produksi : 10.304 Kw

h. Daerah Aliran Sungai (DAS) :

Daerah hukum Polresta Surakarta merupakan daerah aliran sungai dan sering dilanda banjir yang terdiri dari :

1. Sungai Bengawan Solo.

Sungai Bengawan Solo dengan arah muara dari selatan menuju ke Utara dan Desa yang sering terkena banjir daerah kelurahan Danukusuman, kelurahan Semanggi, kelurahan Sangkrah, kelurahan Kampung Sewu, kelurahan Jebres, dan kelurahan Pucang Sawit.

2. Sungai Kali Anyar.

Sungai Kali Anyar dengan arah muara dari Barat ke arah Timur dan dan Desa yang dilalui banjir meliputi kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Gilingan dan kelurahan Sumber.

3. Sungai Jenes.

Sungai Jenes dengan muara dari Barat yang berliku-liku ke Timur dan daerah yang sering terkena Banjir meliputi Kelurahan Sondakan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Danukusuman dan kelurahan Semanggi.

i. Objek Vital :

1. BANK INDONESIA Jl.Jend Soedirman
2. PDAM KOTA SURAKARTA Jl. Adi Sucipto Jajar dan Jl.Juanda Jebres,Jl.Menteri Supeno Manahan
3. GARDU INDUK PLN JAJAR Jl.Prof.Suharso Jajar
4. PASAR LEGI Jl.Sutan Syahrir Banjarsari
5. PASAR KLEWER Jl.Dr.Rajiman Ps.Kliwon
6. TELKOM SURAKARTA Jl.Jend Soedirman

j. Jalan Raya :

Daerah Kota Surakarta mempunyai beberapa jalur jalan raya yang dapat diklarifikasikan dalam beberapa kelas antara lain :

1. Jalan Kelas I meliputi :

a) Sepanjang jalan Slamet Riyadi dan mempunyai kerawanan antara lain : Pintu lintasan KA Purwosari, Lintasan KA dekat pengadaan Purwotomo, Simpang 4 Gendengan, Simpang 4 Ngapeman, Simpang Empat Nonongan dan Gladak.

b) Sepanjang Jl. Urip Sumoharjo : Simpang 4 Pasar gede, Simpang 4 Warung pelem, Pintu Lintasan KA Ledoksari, dan perempatan panggung Jebres.

2. Jalur Kelas II mempunyai panjang 64.358 Km dan berhubungan dengan Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dari jalur tersebut mempunyai kerawanan disepanjang jalan kol. Sutarto, Jl. Ir. Sutami, Jl. A. Yani, Pertigaan Kerten, Perempatan Pucang Sawit dan jembatan gantung Gilingan banjarsari Surakarta.

3. Jalur Kelas III mempunyai panjang Kl. 172,21 Km dan menghubungkan Kota Surakarta dengan Sukoharjo dan mempunyai kerawanan misalnya Pertigaan Sabar Motor, Pertigaan Purwosari, dan Pertigaan Jongke Laweyan Surakarta.

4. Jalur Kelas III A mempunyai panjang 64.935 Km yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Sragen, Karanganyar dan mempunyai kerawanan misalnya Simpang 4 kandang Sapi, Pertigaan Tugu Cembengan dan jembatan Jurug Jebres Surakarta.
5. Jalur Kelas V mempunyai panjang Lk. 50.969 Km. Yang terdapat didalam Kota dan menghubungkan Kota Kecamatan didaerah Kota Surakarta dan mempunyai kerawanan misalnya jembatan Banyuanyar Banjarsari, Perempatan Penggadaian Widuran, Sepanjang Jl. Nusukan dan kandang sapi, Jongke kec. Laweyan Surakarta.

- k. Pelabuhan Udara :
Daerah hukum Polresta Surakarta tidak mempunyai pelabuhan Udara.
- l. Pelabuhan laut :
Daerah Hukum Poresta Surakarta tidak terdapat Pelabuhan Laut.

4.1.2 Demografi

- a. Jumlah Penduduk Kota Surakarta
Daerah hukum Polresta Surakarta berpenduduk 585.486 jiwa dengan kepadatan 12.390 jiwa/km² yang berdomisili di 5 (lima) kecamatan, yang terdiri dari:

Tabel 2
DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA SURAKARTA TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KET
1	2	3	4
1	LAWEYAN	109.264	
2	SERENGAN	61.179	
3	PASAR KLIWON	91.222	
4	JEBRES	148.442	
5	BANJARSARI	175.379	
	KOTA	585.486	

Sumber: Sat Sabhara Polresta Surakarta, 2017

- b. Mata Pencarian
Mata pencaharian penduduk di wilayah Surakarta memiliki keberagaman mulai dari penduduk ekonomi kelas bawah sampai penduduk ekonomi kelas atas antara lain : petani, pedagang, buruh, pegawai, swasta, supir, pegawai negeri dan sebagainya.

- c. Agama
Penduduk di wilayah Surakarta mayoritas beragama Islam.
Dilihat dari penjabaran diatas bahwa masyarakat Surakarta mempunyai keberagaman suku, agama dan ras yang mendiaminya. Ini dapat dilihat adanya pendatang dari luar Surakarta untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup, juga adanya pembangunan infrastruktur. Dengan adanya keberagaman ini membuat karakteristik wilayah Surakarta yang heterogen dimana dapat mempengaruhi jenis kejahatan ataupun gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keberagaman dan karakteristik suku bangsa serta kebudayaan dapat dikatakan sebagai potensi gangguan. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik yang dapat menjadi perbedaan pendapat serta pemikiran dari masing-masing individu di Surakarta. Apabila potensi ini tidak segera dilakukan pencegahan , maka potensi gangguan dapat berkembang menjadi ambang gangguan. Begitupun seterusnya, apabila ambang gangguan tidak ditindaklanjuti akan berkembang menjadi gangguan nyata. Gangguan nyata dalam hal ini adalah tindak kejahatan yang dapat menyebabkan gangguan kamtibmas. Berikut adalah tabel data kejahatan konvensional 2015-2016:

Tabel 3
Data Kejahatan Konvensional



NO	JENIS KEJAHATAN	2015		2016		KET
		L	S	L	S	
1	3	4	5	6	7	8
1	TERHADAP KETERTIBAN UMUM	68	90	183	359	
	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG/BARANG	0	0	0	0	
	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/BANJIR (PEMBAKARAN)	32	32	2	1	
	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS	0	0	22	22	
	PENGEROYOKAN	54	40	40	23	
	SUMPAH PALSU	0	0	0	0	
	PEMALSUAN MATERAI	0	0	0	0	
	PEMALSUAN SURAT	20	11	9	11	
	PERZINAHAN	1	3	0	0	
	PERKOSAAN	2	2	2	1	
	PERMAINAN JUDI / PERJUDIAN	17	26	41	62	
	PENGHINAAN	0	0	2	1	
	PENGANIAYAAN RINGAN	55	35	51	33	
	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	9	7	7	6	
	KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG / PEMBUNUHAN	4	3	0	0	
	PENGANIAYAAN BERAT	76	51	51	17	
	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG MATI	0	0	0	0	
	KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	
	PENCURIAN BIASA	128	81	106	47	
	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	197	69	223	61	
	PENCURIAN RANMOR	124	16	101	15	
	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	12	4	10	10	
	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	9	3	5	0	
	PENGGELAPAN	112	59	120	49	
	PENGGELAPAN DALAM JABATAN	32	18	27	13	
	PENIPUAN / PERBUATAN CURANG	131	60	132	50	
	MENGHANCURKAN / MERUSAK BARANG	16	7	18	12	
	PENADAHAN	1	2	0	0	
	MENERIMA / MEMBERI SUAP	0	0	0	0	
	PENCABULAN	2	3	1	0	
2	UU POKOK AGRARIA (PERTUMAHAN)	3	3	1	1	
3	PERADILAN ANAK	0	0	0	0	
4	PERLINDUNGAN ANAK	26	30	37	22	

5	PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)	33	24	20	9	
6	PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI	0	0	0	0	
7	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0	0	0	0	
8	PENEMPATAN DAN PERLIDUNGAN TKI DILUAR NEGERI	0	0	0	0	
9	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)	0	0	0	0	
10	PORNOGRAFI	0	0	0	0	
11	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)	0	0	0	0	
12	PENYELENGGARAAN PEMILU	0	0	0	0	
13	PEMERINTAH DAERAH	0	0	0	0	
14	KEIMIGRASIAN	0	0	0	0	
15	EKSTRADISI	0	0	0	0	
16	PENYALAHAGUNAAN SENPI/HANDAK/SAJAM	3	2	5	3	
17	FIDUSIA	26	12	19	1	
18	PENEMUAN MAYAT/BUNUH DIRI	63	63	51	51	
	JUMLAH	1260	761	1292	887	

Sumber : Sat Reskrim Polresta Surakarta, 2017

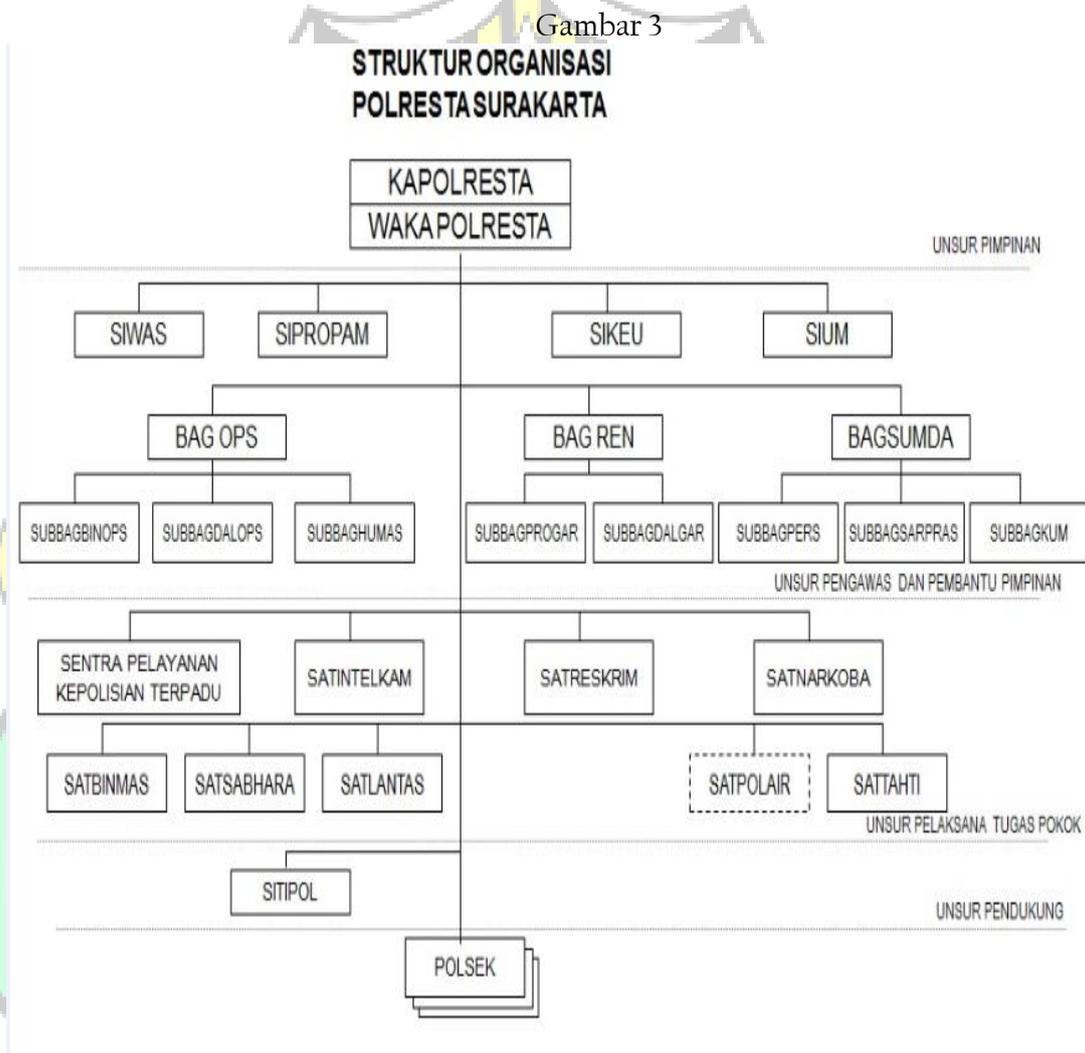
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih adanya pemerasan dan pemalakan yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Surakarta. Untuk mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan ini yaitu dengan adanya pelaksanaan patroli oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta di tempat-tempat rawan terjadinya aksi premanisme. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan analisa mengenai tindak kejahatan premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan acuan data tindak kejahatan yang terjadi pada titik-titik rawan terjadinya aksi premanisme. Hasil pendataan dari sabhara terdapat beberapa titik-titik rawan terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polresta Surakarta, antara lain:

- a. Jenis kejahatan berupa curanmor terjadi di lokasi pertokoan, Solo Grand Mall, Solo Square, pasar Klewer, warnet, daerah kost Jebres.
- b. Jenis kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan atau jambret sering terjadi di Jl.DR Rajiman, Jl.Gatot Subroto, Jl.Ki Mangun Sarkoro, Jl.A.Yani, Jl.S.Riyadi, Jl.Jend Sudirman.
- c. Jenis gangguan kamtibmas berupa balap liar ditemukan di Jl.Adi Sucipto, Jl.Adi Sumarmo, Tugu Adipura, Simpang 4 Manahan, RingRoad Mojosongo
- d. Jenis gangguan kamtibmas berupa mabuk-mabukan banyak ditemukan di daerah terminal Tirtonadi, cafe-cafe, stasiun balapan, stasiun Purwosari, stasiun Jebres, RRI Jl.Ar Saleh, alun-alun utara, stadion sriwedari, monumen 45.

e. Jenis gangguan kamtibmas berupa perkelahian ditemukan di daerah stadion manahan, Jl. Adi Sucipto, Jl. Slamet Riyadi

4.1.3 Struktur Organisasi Polresta Surakarta

Berdasarkan tinjauan dari segi struktur organisasi, dalam pelaksanaan tugas organisasi Polresta Surakarta dipimpin oleh seorang Kapolresta dengan jenjang kepangkatan Komisariss Besar Polisi (Kombespol). Berikut susunan organisasi Polresta Surakarta:



Sumber : Polresta Surakarta, 2017

Tabel 4
Jumlah personil POLRI Polresta Surakarta

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	KA/ WAKA	2
2	BAG OPS	19
3	BAG SUMDA (SB PERS / LAT)	14
	SB HUKUM	4

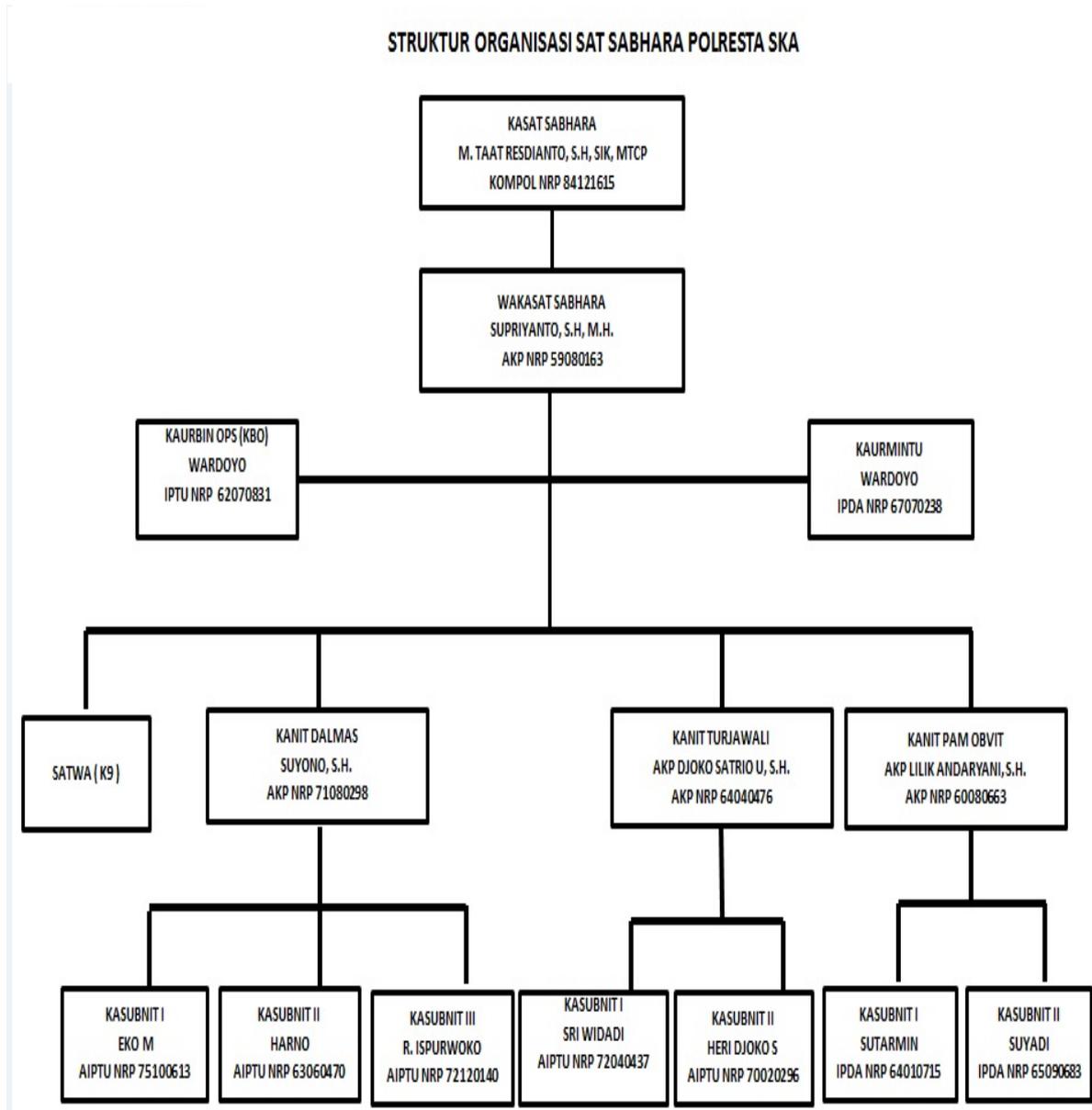
	SB SARPRAS	14
	URKES	22
4	PRIMKOPPOL	
5	<u>BAG REN</u>	9
6	SI UM	5
7	SI KEU	5
8	SI PROPAM	27
9	SI WAS	4
10	SPKT	17
11	SAT INTELKAM	45
12	SAT RESKRIM	85
13	SAT NARKOBA	32
14	SAT BINMAS	15
15	SAT SABHARA	195
16	SAT LANTAS	159
17	SAT TAHTI	8
18	SITI POL	6
20	PAMEN/PA/BA	8
JML PERS POLRESTA		692
21	POLSEK LAWEGAN	90
22	POLSEK BNJARSARI	104
23	POLSEK SERENGAN	87
24	POLSEK PSR KLIWON	80
25	POLSEK JEBRES	92
JUMLAH PERS POLSEK JAJARAN		453
JUMLAH POLRES DAN POLSEK		1145

Sumber : Sumda Polresta Surakarta, 2017

4.1.4 Gambaran umum Satuan Sabhara Polresta Surakarta Struktur Organisasi Satuan Sabhara Polresta Surakarta

Secara struktur organisasi, satuan sabhara tingkat Polresta dipimpin oleh Kasat Sabhara berpangkat Kopol (Komisaris Polisi) dan dibantu oleh Kaurmintu, kaurbinops dan beberapa kepala unit. Adapun struktur organisasi satuan sabhara Polresta Surakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 4



Sumber : Satuan Sabhara Polresta Surakarta,2017

Data personel Satuan Sabhara Polresta Surakarta sebagai berikut

Tabel 5
SUSUNAN ORGANISASI SAT SABHARA POLRESTA SKA

NO	JABATAN	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Kasat Sabhara	KOMPOL	III B	1
2	Wakasat Sabhara	AKP	IV A	1

3	Kaurbinopsnal	IPTU	IIIB	1
4	Kaurmintu	IPDA	IV B	1
5	Bamin	-	-	24
6	Banum	-	-	3
7	Kanit Turjawali	AKP	IV A	1
8	Kasubnit Turjawali	AIPTU	II E	2
9	Banit Turjawali	-	-	39
10	Kanit Pam Obvit	AKP	IV A	1
11	Kasubnit Pam Obvit	IPDA	IV B	2
12	Banit Pam Obvit	-	-	34
13	Kanit Dalmas	AKP	IV A	1
14	Kasubnit Dalmas	AIPTU	II E	3
15	Banit Dalmas	-	-	81
JUMLAH				195

Sumber : Satuan Sabhara Polresta Surakarta,2017

Dari tabel diatas dapat dilihat 195 personel Satuan Sabhara Polresta Surakarta terbagi atas 1 (satu) personel berpangkat Komisaris Polisi, 4 (empat) personel berpangkat Ajun Komisaris Polisi, 3 (tiga) personel berpangkat Inspektur Polisi, 186 (seratus delapan puluh enam) personel berpangkat bintang.

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana utama Polresta Surakarta yang tugas dan wewenangnya berada dibawah perintah Kapolresta Surakarta. Fungsi Sabhara disini bertugas dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pengendalian massa, meningkatkan kegiatan operasi tindak pidana ringan, dan melaksanakan patroli guna mencegah timbulnya gangguan kamtibmas. Berikut merupakan beberapa daerah rawan terjadinya tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Surakarta, antara lain :

Tabel 6
DATA RAWAN KAMTIBMAS (KRIMINALITAS)

N o	Waktu	Jenis Gk	Lokasi	Anatomi	CB	Jarak/waktu tempuh
1	07.30 - 23.00	Curanmor	Pertokoan,solo grand mall, Pgs, Solo Square,psr klewer, tempat kos, jebres, warnet	parkir tanpa pengaman an	Patroli, binluh, razia	3 s/d 7 km / 10 s/d 20 menit
		Curas/jambret	Jl.Dr.Rajiman,Jl.gatotsubroto, Jl.Ki mangun Sarkoro,Jl.A. yani,Jl.S.Riyadi,Jl.Jend Sudirman	jalan ramai/ sepi dan	Patroli, binluh, penjagaan	2 s/d 7 km / 5 s/d 15 menit
			Tempat peribadatan dan perbelanjaan			

		Teror		rambu Traffic Light		2 s/d 10 km / 5 s/d 20 menit
				Adanya kelompok garis keras/ radikal	Patroli, penjagaan, binlul	
2	24.00 - 05.00	Bajing Loncat	Jl. Sumber Nusukan Ring Road Mojosongo Terminal Tirtonadi	Jalur truk Jateng-Jatim Malam hari	Patroli, razia	6 km / 15 menit

Tabel 7
DATA RAWAN GARKUM LAINNYA

No	Waktu	Jenis GK	Lokasi	Anatomi	CB	Jarak/waktu tempuh
1	1 X 24 08.00 – 08.00	Pesta Miras, Psk/waria, pemalakan, calo	Cafe-cafe, terminal Tirtonadi, stasiun balapan, stasiun Purwosari, stasiun Jebres, RRI jl.Ar saleh, alun-alun utara, Stadion Sriwedari, Monumen 45, Hotel	Warung remang-remang/PKL mangkal ciblek/ Psk/waria, Warung Miras,hotel esek2 mankal ojek,taksi, bus ada calo naik turun penumpang, parkir liar	Penjagaan, patroli, razia	3 s/d 8 km/ 5 s/d 20 menit
2	19.00 – 03.00	Balap Liar	Jl.Adi Sucipto, jl.Adi Sumarmo	Banyak komunitas geng motor	Patroli, razia	3 s/d 6 km / 5 s/d 15 menit

Tabel 8
DATA RAWAN POTENSI GANGGUAN MASYARAKAT

No	Waktu	Jenis GK	Lokasi	Anatomi	CB	Jarak/waktu tempuh
----	-------	----------	--------	---------	----	--------------------

1	Minggu 22.00 – 04.00	Balap liar/ trek-trekan	Tugu Adipura, SP4 manahan, Jl.Adi Sucipto, Jl.Adi Sumarmo, Ring road Mojosongo	Geng motor malam hari	Penjagaan, patroli, binlul, razia gabungan	3 km / 15 menit
2	Minggu 08.00 – 03.00	Perkelahian, mengganggu kenyamanan masyarakat lain	Stadion Manahan, Jl.Adi Sucipto, Jl.Slamet Riyadi	Malam hari, banyak anak begadang bergerombolan sambil main musik, pedagang kaki lima/ HIK	Patroli, binlul, penjagaan	1 km / 5 menit

Sumber: Satuan Sabhara Polresta Surakarta, 2017

4.2 Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara dalam Mencegah Aksi Premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta

Salah satu tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta adalah melakukan kegiatan penjagaan yang dimaksud penjagaan menurut Perkebarkam Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi,

Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat pencegahan (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Penjagaan dilakukan sebagai salah satu upaya Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Kegiatan penjagaan yang dilakukan Satuan Sabhara Polresta Surakarta dapat mengurangi kesempatan terjadinya aksi premanisme karena kehadiran petugas polisi di suatu lokasi mempersempit ruang gerak para preman untuk menjalankan aksinya, baik dalam wujud perilaku menyimpang maupun kejahatan. Para preman menjadi enggan untuk melakukan perbuatan menyimpang atau tindakan kriminal setelah melihat adanya petugas yang menjaga suatu lokasi.

Beberapa daerah yang memiliki kerawanan terjadinya aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta memerlukan upaya pengawasan. Bentuk pengawasan ini ditempuh dengan menempatkan sejumlah anggota Sabhara pada beberapa titik rawan gangguan kamtibmas. Keterangan Acp. Supriyanto Plh Kasat Sabhara:

Kita mencoba memperkecil ruang gerak para preman dengan menempatkan petugas patroli, terutama di beberapa titik rawan terjadinya aksi kejahatan yang biasanya menjadi sarang para preman. Beberapa titik yang kami anggap rawan adalah di terminal, pasar-pasar dan parkir. Kegiatan penjagaan juga kami lakukan pada sejumlah lokasi keramaian lainnya seperti lapangan manahan, sriwedari. Kegiatan penjagaan ini kami lakukan pada jam-jam nya, biasanya dilakukan oleh anggota

sambil melakukan patroli atau pengaturan arus lalu lintas. (wawancara dengan Akp.Supriyanto Plh Kasat Sabhara, 08 Maret 2017)

Beberapa lokasi rawan aksi premanisme telah diantisipasi oleh Satuan Sabhara dengan menempatkan sejumlah personel seperti di daerah terminal, pasar-pasar dan tempat keramaian lainnya. Penjagaan berlangsung pada jam-jam tertentu dan penjagaan dilakukan sambil kegiatan patroli atau pengaturan arus lalu lintas. Berdasarkan temuan dilapangan, bahwa kegiatan penjagaan ini sejalan dengan kegiatan patroli maka dibagi dalam 3 zona yaitu, zona 1 wilayah utara standby di pos lantus nusukan, zona 2 wilayah tengah dan timur standby di pos gladak dan zona 3 wilayah selatan dan barat standby di pos pol Sriwedari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 unit fungsi yaitu unit dalmas, turjawali dan unit obvit, semuanya mendapat giliran. Dalam sehari hampir 95 anggota dari tiga unit ini melakukan kegiatan penjagaan bahkan staf yang di kantor pun ikut terkena giliran karena kurangnya anggota. Dari ke 95 anggota ini dibagi untuk menjaga mako, rumah dinas Kapolresta, tahanan, obyek vital seperti Bank-Bank, toko emas dan lain-lain.

Selain kegiatan penjagaan, pelaksanaan tugas pokok lain yang dilakukan Satuan Sabhara Polresta Surakarta adalah kegiatan patroli. Pengertian patroli menurut Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Berdasarkan penuturan Kasat Sabhara menjelaskan bahwa pentingnya patroli bagi Satuan Sabhara dalam mencegah suatu pelanggaran hukum:

Patroli adalah salah satu bentuk tugas Satuan Sabhara yang harus dilakukan dengan berkeliling menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Tujuan patroli adalah untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota polisi. Selain itu dengan adanya patroli segala macam gangguan kamtibmas dapat terdeteksi atas hubungan dengan masyarakat. Terlebih untuk aksi premanisme ini, dengan adanya patroli maka kemungkinan pelaku aksi premanisme dapat tertangkap tangan oleh polisi akan semakin mudah. Hal ini disebabkan karena mobilitas patroli itu sendiri." (Wawancara dengan Akp.Supriyanto Plh Kasat Sabhara Polresta Surakarta, 08 maret 2017)

Selama prakteknya, patroli yang ditempuh Satuan Sabhara Polresta Surakarta dilaksanakan secara rutin dengan menggunakan kendaraan roda empat. Patroli yang dilaksanakan adalah patroli zona. Dalam pelaksanaan tugas ini dilibatkan tiga unit fungsi yaitu unit dalmas, unit turjawali dan unit obvit dengan pergantian waktu masing-masing per 2 jam pelaksanaan tugas. Kanit Turjawali dalam keterangannya:

Peran tugas Satuan Sabhara saat ini yang sering dilakukan adalah pelaksanaan patroli rutin secara terjadwal secara bergantian per 2 jam dengan 3 unit fungsi yaitu unit turjawali, unit dalmas, unit obvit. (wawancara dengan Kanit Turjawali Akp.Joko, 08 Maret 2017)

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan patroli terdapat 3 regu piket. Tiap regu berdinam per 2 jam selama 24 jam. Berikut tabel pembagian regu patroli di Satuan Sabhara Polresta Surakarta:

Tabel 9
Tabel Jadwal Jam Patroli Piket Satuan Sabhara Polresta Surakarta

NO	UNIT	SIANG	MALAM
1	TURJAWALI	09.00-11.00 15.00-17.00	21.00-23.00 03.00-05.00
2	DALMAS	13.00-15.00 18.00-20.00	01.00-03.00 06.00-08.00
3	OBVIT	11.00-13.00 17.00-19.00	23.00-01.00 05.00-07.00

Sumber : Sat Sabhara Polresta Surakarta 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk piket patroli diemban oleh tiga unit fungsi yang masing-masingnya mendapat waktu piket per 2 jam secara bergantian selama 24 jam. Kemudian untuk zona patroli dibagi 3 zona yaitu zona 1 wilayah utara standby di pos lintas nusukan, zona 2 wilayah tengah dan timur standby di pos gladak dan zona 3 wilayah selatan dan barat standby di pos pol sriwedari. Selain melakukan kegiatan penjagaan dan patroli ini, Satuan Sabhara juga melakukan razia di sekitar terminal seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga terminal:

Dulu memang banyak calo-calo disini dan juga ada pungutan liar terhadap sopir-sopir angkutan, tetapi setelah pihak terminal bergabung dengan polisi untuk memberantas para calo dengan cara merazia, 90% premanisme disini berkurang akibat dari gencarnya pihak terminal dengan gabungan polisi untuk memberantas aksi premanisme tersebut. (wawancara dengan masyarakat, 08 Maret 2017).

Berdasarkan penuturan warga di atas bahwa kegiatan dari Satuan Sabhara ini berdampak positif bagi warga sekitar terminal. Sehingga membuat wilayah sekitar terminal menjadi aman dari tindak kejahatan.

4.2.1 Hasil Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara dalam Mencegah Aksi Premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan serta telaah dokumen bahwa Satuan Sabhara turut berperan dalam mencegah aksi premanisme melalui kegiatan penjagaan. Apabila disandingkan dengan Perkabaharkam No. 2 Tahun 2011 pasal 14 ayat (3) yang berbunyi:

Menyiapkan kekuatan yang akan dilibatkan, berdasarkan kerawanan di atas dan kemampuan personel sesuai sasaran penjagaan yang dihadapi.

Dari pasal di atas, ditemukan ketidaksesuaian antara aturan Perkabaharkam dengan pelaksanaan di lapangan, kekuatan yang dilibatkan sama sekali tidak berdasarkan kerawanan

yang terjadi. Ini disebabkan karena kurangnya personil jadi kekuatan personil yang dilibatkan untuk di penjagaan hanya sejumlah satu orang saja. Sehingga apabila ada suatu kejadian tindak kejahatan, personil akan susah untuk memback up hal tersebut.

Ketika penulis melakukan observasi ke salah satu terminal didapati pos pol dalam keadaan kosong tidak ada petugas piketnya. Hal ini menjadi perhatian bahwa tidak cukup untuk piket penjagaan hanya satu orang saja karena ketika petugas lainnya sedang melaksanakan ishoma, seharusnya petugas piket lainnya bergantian untuk berjaga. Apabila ada tindak kejahatan, maka petugas lain yang sedang berjaga dapat mengambil alih tugas tersebut.

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta. Kegiatan patroli dilaksanakan secara rutin didalam kota, sedangkan untuk daerah di luar kota dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polsek, patroli menggunakan kendaraan roda empat. Dalam kegiatan patroli ini penulis menemukan masih ada ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan yang seharusnya seperti yang terdapat pada Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 pasal 6 ayat (2) tentang persiapan yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. menyiapkan surat perintah;
- b. menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;
- d. menentukan rute berangkat dan rute kembali;
- e. menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya; dan
- f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli.

Dalam melakukan kegiatan patroli, penulis menemukan bahwa patroli tidak menyiapkan surat perintah, tetapi patroli dilakukan hanya dengan cara mengelilingi perkotaan dan hal ini dilakukan secara rutin. Personil dalam pelaksanaan patroli hanya sejumlah dua orang saja, yang seharusnya patroli dilaksanakan oleh tiga orang. Apabila bahan bakar kendaraan patroli sudah mulai habis, petugas patroli akan segera kembali tanpa menyelesaikan kegiatan patroli karena keterbatasan bahan bakar. Sehingga terkadang Kanit Turjawali memberikan kupon bahan bakarnya kepada anggota piket agar mengisi bahan bakar kembali. Jadi pelaksanaan Satuan Sabhara dalam pencegahan aksi premanisme belum optimal.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Satuan Sabhara dalam Mencegah Aksi Premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Sabhara dalam pelaksanaan tugas mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta, faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam Satuan Sabhara Polresta Surakarta sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari diluar tetapi berdampak terhadap kinerja Satuan Sabhara dalam upaya mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

a. Faktor Internal

1. Faktor pendukung

- a) Koordinasi secara vertikal dengan Satuan Sabhara Polsek Bentuk koordinasinya ditempuh melalui kegiatan patroli kewilayahan operasional dari masing-masing Polsek. Menurut Kanit Turjawali Polresta Surakarta Akp Joko :

Selama melakukan pencegahan terhadap aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta terdapat faktor pendukung yaitu saling berkoordinasi dengan Satuan Sabhara Polsek yang juga memiliki tanggung jawab sama untuk menjaga situasi dan kondisi kamtibmas. Tanpa adanya bantuan dari Satuan Sabhara Polsek cukup sulit bagi Polres untuk menjangkau seluruh wilayah hukum. Untuk itulah dukungan dari Polsek setidaknya mampu mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam kegiatan patroli yang ditujukan untuk mempersempit ruang gerak dari para preman. (wawancara dengan Kanit Turjawali, 6 maret 2017)

- b) Didukung oleh Sarana prasarana yang masih bagus Satuan Sabhara Polresta Surakarta memiliki kendaraan patroli yang terdiri dari Mobil Kbm backbone 2 unit, ranger 1 unit, truk 3 unit, panther 1 unit, kendaraan roda dua 20 unit, sepeda 10 unit, untuk polsek 5 mobil Kbm kemudian untuk komputer juga masih bagus.
2. Faktor penghambat
- a) Keterbatasan personil
- Menurut data standar personil, jumlah personil Satuan Sabhara sudah mencukupi standar namun ada faktor lain yang membuat personil di Satuan Sabhara masih dirasakan kurang berdasarkan penuturan Plh Kasat Sabhara Polresta Surakarta Akp.Supriyanto dalam wawancaranya :
- Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal untuk jumlah personil ditambah dengan obvit sudah melebihi tetapi karena wilayah cukup luas maka masih dirasa kurang dan juga karena ada permintaan untuk penjagaan toko emas, bank-bank sehingga membuat jumlah personel berkurang. (Wawancara dengan Plh Kasat Sabhara, AKP.Supriyanto, 06 Maret 2017)

Tabel 10
Data personil unit Sat Sabhara Polsek

NO	KESATUAN/ POLSEK	TIPE POLSEK	JUMLAH PERSONIL		KETERANGAN
			DSPP	RIIL	
1	2	3	4	5	6
1	POLSEK BANJARSARI	URBAN	22	28	KELEBIHAN 6 PERS
2	POLSEK LAWEYAN	URBAN	22	20	KURANG 2 PERS
3	POLSEK SERENGAN	URBAN	22	22	SUDAH SESUAI DSPP
4	POLSEK JEBRES	URBAN	22	18	KURANG 4 PERS
5	POLSEK PASAR KLIWON	RURAL	12	12	SUDAH SESUAI DSPP

- b) Sarana prasarana yang masih kurang
 Untuk kendaraan roda 4 yang dipakai dalam kegiatan patroli yaitu kbm backbone boros dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak, sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi faktor penghambat Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikeluhkan oleh salah satu anggota unit patroli :
 Untuk BBM alokasi dinas hanya diberikan 5 liter untuk satu kali patroli saja. Padahal untuk rute yang harus ditempuh cukup jauh, belum lagi mobilnya yang boros, sehingga dengan BBM sebanyak 5 liter tidak mungkindapat melaksanakan tugas patroli lebih lama. (wawancara dengan anggota unit patroli, 7 Maret 2017)

Subsidi BBM dari dinas yang diberikan kepada anggota Unit hanya sebanyak 5 liter untuk satu kali patroli. Kondisi ini tentu saja menjadi faktor penghambat yang dihadapi anggota untuk dapat melaksanakan patroli. Sarana prasarana selanjutnya adalah keterbatasan alat komunikasi yaitu berupa HT, salah satu anggota patroli Aiptu Daryanto mengeluhkan:

Terkadang kalau kita sedang berada di luar kendaraan untuk melakukan tugas mengatur arus lalu lintas, kita tidak dapat mendengar adanya panggilan atau perintah untuk mendatangi Tkp. Hal ini disebabkan alat komunikasi hanya ada di dalam mobil patroli saja, jadi kalau kita sedang ada di luar mobil terkadang tidak terdengar. (wawancara dengan anggota patroli Aiptu Daryanto, 06 Maret 2017)

Bersumber keterangan di atas dapat diketahui bahwa untuk alkom khususnya HT masih ada kekurangan.

a. Faktor Eksternal

1. Faktor pendukung

- a) Masyarakat yang peduli
 Sebagian masyarakat ada yang peduli terhadap tindak kejahatan, mereka sadar bahwa tindak kejahatan tersebut harus dibasmi sehingga mereka mau melapor kepada Polisi setempat jika ada tindak kejahatan yang mengganggu kamtibmas.
- b) Koordinasi dengan tokoh-tokoh dalam masyarakat
 Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh semua agama, RT/RW untuk memberitahu masyarakat bahwa perlunya mencegah aksi premanisme yang mengganggu kamtibmas.
- c) Koordinasi dengan instansi lainnya
 Instansi lain seperti satpam, Pol PP, juga ikut memberikan informasi mengenai tindak kejahatan. Sehingga Satuan Sabhara lebih mudah mendapatkan informasi lainnya.
- d) Anggaran
 Dari hasil jasa penjagaan Obyek Vital seperti Bank-Bank, toko emas dan lain-lain maka personil mendapatkan dana tambahan dari hasil jasa penjagaan obyek vital tersebut.

2. Faktor penghambat

- a) Koordinasi dengan masyarakat masih kurang

Belum terealisasi secara optimal untuk penghimbau kepada masyarakat bahwa jika ada tindak kejahatan, maka masyarakat dapat menghubungi nomor telepon SPKT.

- b) Tingkat pengangguran yang masih tinggi tingkat pengangguran yang masih tinggi sehingga memiliki kerentanan terhadap tumbuhnya aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka berkumpul ditengah jalan sehingga dapat berpotensi terhadap timbulnya perilaku menyimpang atau kejahatan.

4.4 Upaya-Upaya Satuan Sabhara dalam Mencegah Aksi Premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta

Masih sering terjadinya aksi premanisme diberbagai tempat di Surakarta, baik di terminal, mall-mall, pasar-pasar, stadion dan pusat keramaian lainnya. Semakin ramai suatu tempat maka juga semakin besar pula kemungkinan adanya aksi premanisme.

Karena maraknya aksi premanisme tersebut, maka peran penting Satuan Sabhara dalam upaya mencegah aksi premanisme agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga agar terbebas dari ancaman-ancaman gangguan kamtibmas maka Satuan Sabhara melaksanakan penjagaan dan patroli terjadwal secara bergantian per 2 jam dengan 3 unit fungsi yaitu unit turjawali, unit dalmas, unit obvit. Berdasarkan wawancara dengan Plh Kasat Sabhara, AKP.Supriyanto :

Upaya yang dilakukan preemtif preventif dan melaksanakan kegiatan patroli yang sudah terjadwal, sudah diatur jam-jamnya dengan tiga unit fungsi yaitu unit turjawali, unit obvit dan unit dalmas. Untuk kegiatan penjagaan sendiri sudah merangkap ke kegiatan patroli. (Wawancara dengan Plh Kasat Sabhara Akp.Supriyanto, 06 Maret 2017)

Maka upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta untuk mencegah aksi premanisme adalah dengan melaksanakan patroli rutin, meningkatkan operasi pekat, menggalang tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan patroli dialogis kepada pimpinan kelompok preman.

Upaya pencegahan yang dilakukan mempunyai dampak yang baik dalam mencegah aksi premanisme di Surakarta, sebagaimana dituturkan oleh Plh Kasat sabhara Akp.Supriyanto dalam wawancara:

Dengan melakukan upaya tersebut dapat memperkecil ruang gerak dari pelaku kejahatan karena dengan keberadaan polisi membuat mereka lebih waspada dan pada akhirnya mengurungkan niat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. (Wawancara dengan Plh Kasat Sabhara Akp.Supriyanto,06 Maret 2017)

Selain melaksanakan kegiatan patroli rutin, Satuan Sabhara Polresta Surakarta juga menggalang tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam upaya pencegahan terhadap aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kegiatan ini dilakukan agar tokoh-tokoh tersebut dapat memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana aksi premanisme terjadi, kemudian dapat dicegah sedini mungkin setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian.

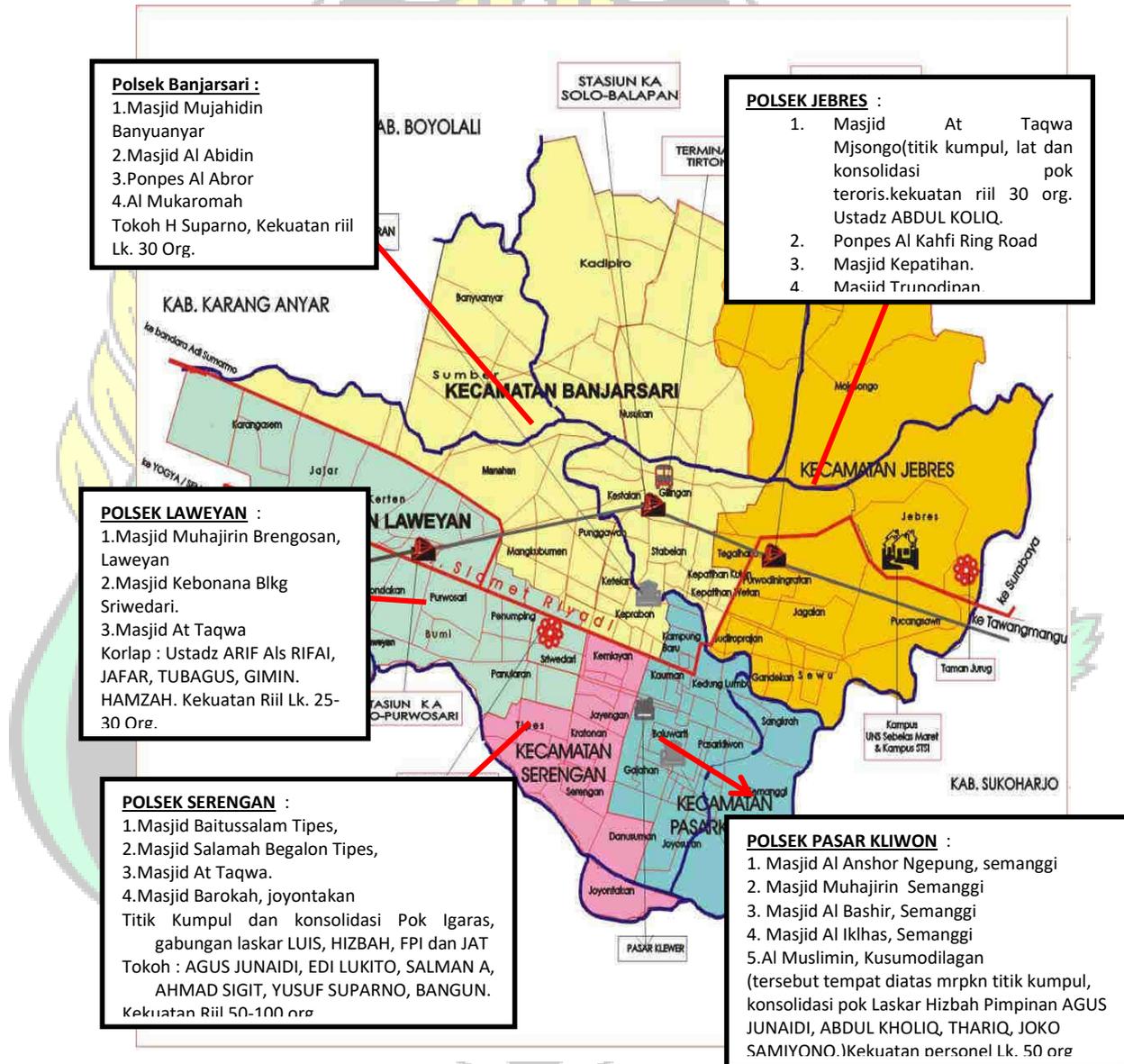
Upaya lainnya yang dilakukan Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme yaitu patroli dialogis dengan pimpinan kelompok preman maupun masyarakat. Hasil wawancara Kanit Turjawali Akp.Joko juga mengatakan bahwa :

Dalam upaya pencegahan aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta ini maka dilakukan patroli dialogis yang mana para petugas patroli bertatap muka dengan masyarakat dan memberikan pesan-pesan kamtibmas. Kemudian melakukan

patroli ditempat-tempat yang rawan akan aksi premanisme. (Wawancara dengan Kanit Turjawali Akp.Joko, 07 Maret 2017).

Jadi untuk mencegah aksi premanisme ini, maka dilakukan patroli dialogis yaitu petugas polisi langsung bertatap muka dengan masyarakat kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang aksi premanisme di wilayah Hukum Polresta Surakarta. Berikut adalah peta route patroli Satuan Sabhara Polresta Surakarta:

Gambar 5
Route Patroli Sat Sabhara



Sumber: Satuan Sabhara Polresta Surakarta,2017

Tabel 11

Berikut ini adalah plotting Pam PH pagi Satuan Sabhara Tahun 2017

NO	LOKASI	PERS	PADAL	KET
1	Depan pasar Kleco	OBVIT	Pawas pada hari itu	PAM Ph pagi dilaks hari : Senin s/d
2	Depan SDN 1&2 Kleco	OBVIT		

3	Sp.3 Jl.Blimbing	OBVIT	Kamis Pukul : 06.30 s/d 07.30
4	Depan Kal.Kerten	OBVIT	
5	Depan Kiky	OBVIT	
6	Depan SMK 7/Kodim	OBVIT	
7	DPRD	DALMAS	
8	Sp.4 Hotel Fave	DALMAS	
9	SMK Yosep	DALMAS	
10	Sp.3 Mujahidin	Turjawali	
11	Sp.4 Krembyongan	Turjawali	
12	Depan Mapolresta	STAF	
13	Depan TK bhayangkari	STAF	
14	Depan Kediaman Solo 1	STAF	

Sumber : Sat Sabhara Polresta Surakarta, 2017

Tabel berikut diatas menjelaskan tentang kegiatan Satuan Sabhara dalam piket Pam Ph pagi yang dilakukan oleh unit-unit dalam sabhara, ditempatkan pada daerah yang kegiatan pada pagi harinya cukup ramai karena dikhawatirkan terjadinya tindak kejahatan.

1.4.1 Hasil Analisis Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah Aksi Premanisme

Dalam upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme harus mengikuti zaman karena semakin berjalannya waktu para pelaku semakin mencari cara untuk melakukan aksinya agar tidak diketahui oleh siapapun. Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan tugas pokok serta upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Polresta Surakarta dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta yaitu patroli rutin, penggalangan tokoh masyarakat dan pemuda, meningkatkan operasi pekat, melakukan patroli dialogis terhadap pimpinan kelompok preman maupun masyarakat. Upaya sebagaimana diartikan berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha. Dengan demikian kata ikhtiar dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, kata upaya diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Patroli adalah kegiatan kepolisian yang diarahkan untuk menghilangkan bertemunya faktor niat dan kesempatan dari orang atau sekelompok orang yang akan melakukan kejahatan maupun gangguan kamtibmas.

Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya aksi premanisme oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta, kegiatan patroli rutin dilakukan di titi-titik tertentu yang dianggap rawan gangguan kamtibmas. Dihubungkan dengan teori Manajemen, maka satuan Sabhara dalam pelaksanaan tugasnya, harus menggunakan empat hal pokok agar dalam pencapaian tujuan suatu organisasi bisa tercapai yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keempat hal pokok itu adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengendalian).

a. Planning (Perencanaan)

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta perlunya rencana awal yang dibuat agar kegiatan kedepan dapat berjalan lancar serta tercapainya tujuan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta berupa perencanaan kegiatan yang bersifat preventif terhadap aksi premanisme.

Dalam hal kegiatan penjagaan dan patroli perencanaan dilakukan berupa penentuan titik-titik rawan mana yang sering terjadi aksi premanisme serta pola patroli yang akan dilakukan sebagai bentuk dari tindakan pencegahan. Dengan adanya penentuan ini maka dapat diketahui letak rawan tindak kejahatan dan dapat dilakukan kegiatan ini sebagai upaya preventif dari aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta. Segala kesiapan baik dari jumlah personel maupun sarana prasarana yang digunakan diatur dalam proses perencanaan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Tahap ini merupakan tahap dilakukan pembagian jumlah personel dalam masing-masing tugas. Pada pelaksanaan tugas dari Satuan Sabhara Polresta Surakarta, fungsi pos jaga merangkap dengan fungsi pos patroli, begitu juga dengan personelnnya. Untuk jumlah personel sebenarnya sudah memenuhi Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) namun karena banyaknya permintaan jaga diluar kepolisian seperti penjagaan Bank, penjagaan toko emas dan lain-lain sehingga membuatnya masih belum cukup.

c. Actuating (pelaksanaan)

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penjagaan dan patroli dilakukan dalam bentuk upaya preventif. Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan penjagaan dan patroli yang dilakukan oleh satuan sabhara Polresta Surakarta dalam rangka mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta, tidak hanya dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta saja tapi juga dilakukan oleh Satuan Sabhara Polsek setempat.

Dalam hal kegiatan patroli, kegiatan ini dilakukan setiap 2 jam sekali dengan mengelilingi wilayah hukum yang memiliki titik-titik rawan tindak kejahatan. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal oleh 3 unit yaitu unit turjawali, unit dalmas dan unit obvit. Apabila ada laporan ataupun pengaduan dari masyarakat maka piket patroli yang sedang berada di wilayah patroli akan segera datang, apabila ada hambatan maka akan berkoordinasi dengan Polsek-Polsek terdekat.

d. Controlling (pengendalian)

Dalam suatu kegiatan harus ada pengawasan dan pengendalian dari pimpinan. Hal ini sangat diperlukan agar anggota dari suatu organisasi tetap fokus pada tujuan organisasi. Jika diterapkan dalam Satuan Sabhara Polresta Surakarta, maka terdapat pimpinan yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan upaya Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta terutama dalam pelaksanaan kegiatan penjagaan dan patroli, maka terdapat pimpinan yang menjadi pengawas dari kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya personel yang berpangkat Perwira yang bertugas sebagai perwira pengawas. Fungsi pengawasan dan pengendalian sangatlah penting dalam pelaksanaan tugas anggota Satuan Sabhara Polresta Surakarta, agar anggota Sabhara tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya anggota sabhara melakukan pelanggaran atau tindakan yang dianggap menyimpang dari aturan yang sudah ada, perwira pengawas sebagai pengendali disini bisa melaporkan ke atasan langsung ataupun pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Satuan Sabhara Polresta Surakarta telah menerapkan fungsi manajemen dalam rangka mencegah aksi premanisme di wilayah hokum Polresta Surakarta. Selain itu, petugas patroli juga melaksanakan patroli dialogis yaitu kegiatan patroli dengan cara melaksanakan sambang ke tempat-tempat rawan

terjadinya aksi premanisme guna memberikan pesan-pesan kamtibmas sebagai upaya preemtif dari Satuan Sabhara sendiri. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa patroli dialogis lebih efektif dalam mencegah aksi premanisme, hal ini dikarenakan dengan melaksanakan patroli dialogis, kita sebagai anggota Polri mendapat beberapa keuntungan yaitu bisa mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap aksi premanisme dengan cara mengajarkan masyarakat segera melaporkan ke polisi apabila terjadi aksi premanisme di lingkungan sekitarnya. Sehingga selain itu kita dapat memperbaiki citra Polri di mata masyarakat akan semakin harmonis.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai upaya Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta yang dilakukan berdasarkan teori dan konsep yang dihubungkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta yaitu dengan melakukan kegiatan penjagaan dan patroli. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Sabhara disandingkan dengan Perkabaharkam No.2 Tahun 2011 dan Perkabaharkam No.4 Tahun 2011.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta yaitu pertama faktor internal, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang masih kurang, anggaran belum mencukupi, juga subsidi BBM yang masih belum memadai. Kedua faktor eksternal , yaitu peran masyarakat yang mau melaporkan tindak kejahatan tersebut dan koordinasi dengan pihak lain
- c. Upaya Satuan Sabhara dalam mencegah aksi premanisme di wilayah hukum Polresta Surakarta. Dalam wilayah hukumnya upaya pencegahan yang dilakukan yaitu patroli rutin, penggalangan tokoh masyarakat dan pemuda, meningkatkan operasi pekat, melaksanakan patroli dialogis terhadap pimpinan kelompok preman maupun masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas dari Satuan Sabhara Polresta Surakarta.

5.2 Saran

Dilihat dari kesimpulan yang ada, saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Perbaiki sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Surakarta seperti keterbatasan BBM yang diberikan saat melaksanakan tugas patroli lebih ditingkatkan karena dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hal tersebut perlu diperhatikan lagi masalah distribusi BBM. BBM diberikan untuk R2 sebanyak 2 liter/hari, R4 sebanyak 5 liter/hari. Jika disesuaikan dengan daerah patroli, maka tidak cukup, hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas patroli tidak berjalan secara efektif. Maka dari itu diperlukan adanya penambahan subsidi BBM kepada anggota patroli Polresta Surakarta agar pelaksanaan tugas patroli dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- b. Pencegahan terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polresta Surakarta difokuskan pada penjagaan dan patroli. Dalam pelaksanaannya, penjagaan belum dilaksanakan secara optimal karena kekurangan personel, untuk itu diharapkan

agar personel untuk ditambah lagi, sarana prasarana yang masih kurang diharapkan agar ditingkatkan dan anggaran untuk dicukupi agar personil sejahtera.

- c. Menerapkan manajemen yang baik dan tepat pada satuan Sabhara, dimulai dengan melakukan perencanaan yang tepat sesuai dengan informasi yang diterima, pengorganisasian terhadap anggota, pelaksanaan yang sesuai prosedur dan pengawasan terhadap anggota di lapangan. Sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien dan maksimal sehingga memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bogdan, R., & Biklen, S. 1992 *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh . 1998 . *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjagaan*
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Skripsi

- Rangkuti, Anhar Arlia, 2010 Skripsi tentang *Peranan Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Mendukung Program Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan*: Jakarta: STIK-PTIK.
- Suhendra, Made Wira, 2013 Skripsi tentang *Optimalisasi Penanganan Aksi Premanisme Oleh Satuan Sabhara Polresta Bekasi Kota*: Semarang: STIK-PTIK.

Artikel/Makalah/Internet/Lain

Istilah *Premanisme* dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>).

Field Research (Penelitian Lapangan) dalam

<http://makalahlaporanterbaru.blogspot.co.id/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>

Metode *Pengumpulan Data* dalam <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

Metode Penelitian Kualitatif dalam <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
Strategi Pencegahan Kejahatan Dalam Rangka Harkamtibmas dalam

<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas/.23>

Teknik Analisis Data Dalam Penelitian dalam

<https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/>

